

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam setiap organisasi terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi tersebut, baik di dalam maupun di luar organisasi. Pihak-pihak ini memerlukan informasi mengenai kinerja organisasi pada periode tertentu. Oleh sebab itu, sebagai salah satu bentuk wujud pertanggungjawaban, organisasi memerlukan suatu pembukuan atas kegiatan operasinya. Kegiatan pembukuan ini diwujudkan dengan adanya kegiatan akuntansi dalam organisasi tersebut. Keperluan akan kegiatan akuntansi ini berlaku baik bagi organisasi pemerintahan, perseorangan, maupun organisasi lainnya. Dari kegiatan ini, kemudian diperoleh data keuangan yang disampaikan dalam bentuk laporan keuangan dalam periode tertentu, dan digunakan dalam pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan atas organisasi tersebut. Menurut Kasmir (2014), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi keuangan tentang entitas pelapor yang berguna bagi investor ekuitas saat ini dan calon investor, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam mengambil keputusan mengenai penyediaan sumber daya kepada entitas. (Kieso, 2018). Atas dasar ini, maka laporan keuangan suatu organisasi perlu disusun berdasarkan standar yang berlaku. Tentu saja standar yang digunakan

disesuaikan dengan negara di mana organisasi tersebut beroperasi. Di Indonesia berlaku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK). Standar ini dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan akuntansi organisasi-organisasi di Indonesia. Salah satu jenis organisasi yang menggunakan standar ini adalah organisasi nirlaba. Dalam pelaporan kegiatan keuangannya, organisasi nirlaba menggunakan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba, yang kemudian digantikan oleh ISAK 35 tentang Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba sebagai acuannya.

Organisasi nirlaba adalah suatu entitas yang tujuan utamanya bukan untuk memperoleh keuntungan, sumber daya utamanya diperoleh dari sumbangan para anggota dan para penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun, serta didirikan dan dikelola oleh masyarakat atau pihak swasta dengan tujuan membantu masyarakat atau pihak-pihak yang membutuhkan. Walaupun berbeda dengan organisasi bisnis, organisasi nirlaba pada dasarnya tetap memerlukan adanya pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan karena di dalam organisasi nirlaba terdapat pengguna laporan keuangan dengan kepentingannya masing-masing. Pengguna laporan keuangan ini antara lain adalah pihak manajerial dari organisasi serta penyumbang dana organisasi nirlaba tersebut. Selain itu, laporan keuangan juga berguna dalam menilai jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba tersebut,

serta cara manajer melaksanakan tanggung jawabnya. Hal ini juga berlaku pada gereja sebagai organisasi nirlaba.

Gereja berasal dari bahasa Portugis igreja yang berakar dari bahasa Yunani, εκκλησία (ekklêsia), yang berarti perkumpulan umum atau persidangan publik. Istilah ekklesia dipakai oleh orang Kristen mula-mula untuk menyebut perkumpulan mereka, baik dalam lingkup lokal maupun umum (Wijaya, 2010). Dalam perkembangannya, gereja banyak terbagi berdasarkan kesukuan di daerah-daerah tertentu. Salah satunya adalah Gereja Paulus Kota Kupang. Gereja Paulus Kota Kupang adalah entitas nirlaba yang bergerak dalam bidang pelayanan gerejawi untuk mencapai tujuannya. Tujuan yang ingin dicapai tersebut adalah membina jemaat agar dapat menjadi gereja yang berkembang dalam Kristus. Dalam mendanai kegiatan operasi sehari-hari untuk mencapai tujuan tersebut, Gereja Paulus Kota Kupang menggunakan dana yang bersifat pemberian sukarela dari jemaat maupun dari donatur. Gereja pada umumnya, walaupun merupakan entitas yang terikat dalam iman dan komitmen kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga merupakan komunitas manusia yang saling mendukung dalam iman dan bekerja bersama demi kemuliaan Tuhan. Kegiatan sehari-hari gereja adalah “mengelola sumber daya yang Tuhan percayakan kepada kita, mengorganisir pelayanan dan misi, dan menyediakan program untuk melaksanakan mandat gereja

(Osisioma, 2013). Atas dasar adanya pengelolaan sumber daya dan kegiatan yang menghasilkan suatu output, maka diperlukan adanya akuntabilitas atau pertanggungjawaban oleh gereja.

Keathley (2004) menyebutkan lima alasan pentingnya akuntabilitas dalam gereja adalah sebagai berikut

1. Akuntabilitas adalah bagian penting dari masyarakat fungsional, yang prototipenya adalah Ketuhanan Tritunggal itu sendiri
2. Akuntabilitas membantu meningkatkan kontrol alkitabiah atau checks and balance
3. Akuntabilitas diperlukan karena seperti domba kita cenderung menentukan jalannya sendiri
4. Akuntabilitas mendorong kepemimpinan yang bersifat pelayan sesuai dengan mandat pastoral untuk mengawasi kawanan domba
5. Akuntabilitas bersifat melindungi baik pemimpin maupun dirinya sendiri kawanan

Oleh karena itu pertanggungjawaban dalam konteks ini yaitu mengembangkan hubungan dengan sesama orang kristen yang membantu mempromosikan realitas spiritual, kejujuran, ketaatan kepada Tuhan dan evaluasi yang tulus atas pelayanan dan hubungan seseorang dengan Tuhan dan sesama manusia (Nighswander, 2002). Pendapat tersebut menjelaskan bahwa akuntabilitas

dalam konteks gerejawi berpusat pada usaha dalam menjalin hubungan dengan sesama jemaat demi mewujudkan pengembangan iman dalam Kristus secara bersama-sama.

Menurut hasil penelitian lain, akuntabilitas dalam gereja meliputi aspek spiritual, sosial, dan keuangan oleh para anggota jemaat serta pimpinan gereja melalui perilaku mereka dalam kegiatan sehari-hari (Saerang, 2013). Aspek spiritual dan sosial inilah yang memberikan perbedaan tersendiri terhadap konsep akuntabilitas gereja sebagai entitas keagamaan yang didominasi oleh unsur teologis. Walaupun begitu, pengurus gereja tetap tidak boleh mengabaikan akuntabilitas gereja dalam aspek keuangan secara umum.

Salah satu wujud akuntabilitas dari aspek keuangan adalah bagaimana gereja melakukan pelaporan keuangannya. Apabila pelaporan keuangan yang dilakukan tidak andal, maka kepercayaan donatur, dalam kasus ini jemaat, akan berkurang, sehingga dana sumbangan yang diterima dari donatur juga berkurang. Hal ini sesuai dengan temuan dari penelitian terdahulu, yaitu pelaksanaan tanggung jawab fiskal melalui kinerja fiskal dapat membantu organisasi dalam mencapai eksistensi dan misi yang lebih sempurna guna mendapatkan kontribusi yang lebih besar (Ridky, 1985).

Penting bagi gereja untuk melakukan pelaporan keuangannya secara andal. Dalam menyusun sebuah laporan keuangan, gereja sebagai entitas nirlaba harus mengikuti standar yang berlaku di tempat kegiatan operasinya. Oleh sebab itu,

Gereja Paulus Kota Kupang sebagai entitas nirlaba, dalam menyusun laporan keuangannya harus mengikuti PSAK 45 sebagai standar yang mengatur tentang entitas nirlaba pada periode pelaporan yang diteliti oleh penulis, atau mengikuti standar terbaru terkait penyajian laporan keuangan entitas nonlaba, yaitu ISAK 35.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Menganalisis Penerapan PSAK No. 45 Dalam Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba khususnya di GMIT Paulus Kota Kupang.. Dengan demikian peneliti mengambil penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan PSAK No. 45 Dalam Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada GMIT Paulus Kota Kupang**”.

1.2. RUMUSAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Menganalisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan No. 45 pada GMIT Paulus Kota Kupang.

1.3. PERSOALAN PENELITIAN

Berdasarkan Masalah Penelitian diatas, maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah Penerapan PSAK No. 45 Tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba telah sesuai dengan penyajian laporan keuangan Di GMIT Paulus Kota Kupang ?

1.4. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. TUJUAN PENELITIAN

- a. Untuk Mengetahui Apakah Penerapan PSAK No. 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba telah sesuai dengan Penyajian Laporan Keuangan Di GMIT Paulus Kota Kupang.

1.4.2. MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau informasi dalam mendukung penelitian selanjutnya tentang bagaimana Analisis Penerapan PSAK No. 45 dalam Pengelolaan Keuangan Organisasi Nirlaba, oleh para akademisi untuk menunjang dunia penelitian pada bidang yang sama.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Gereja

Penelitian ini diharapkan mampu membantu gereja dalam mengelola keuangan berdasarkan pola penerapan PSAK No. 45 yang transparan dan mengarah pada pertanggungjawaban, serta memberi gambaran mengenai prinsip akuntansi di dalam gereja. Sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadi kecurigaan jemaat terhadap pengelolaan keuangan gereja.

2. Bagi Jemaat

Penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan bagaimana sistem pengelolaan keuangan gereja kepada jemaat, sehingga jemaat mampu berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan keuangan di gereja agar dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam gereja dan juga bermanfaat bagi jemaat yang ingin mengetahui penerapan PSAK No. 45 yang transparan dalam pengelolaan keuangan gereja.

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam perkembangan pengetahuan mengenai penerapan PSAK No. 45 dalam pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabilitas yang ada di gereja, dan membantu dalam penetapan standar akuntansi pada organisasi keagamaan yang bersifat nirlaba.